

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R. dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2005-2014. Diakses dari www.sumbar.bps.go.id
- Brotodirhajo, R Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Davey, K,J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah*, UI Press, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics*, 4th Edition. New York :McGraw-Hill.
- Hidayat, Syarif. 2000. “*Dilema Otonomi Daerah: Perluasan Wewenang Daerah vs Wewenang Elite Politik Daerah*”.*Jurnal Analisis CSIS*. Tahun XXIX/No.01.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Nehara Republik Indonesia “Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya”*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lains, Alfian. 1985. *Pendapatan Daerah Dalam Orde Baru*. Prisma.
- Musgrave. 1990. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek (Edisi 5)*. Jakarta: PT. Erlangga.

Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. 2005. *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Purnamasari, Gesit. 1997. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sarundjang dalam Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Setiawan dan Kusri Dwi Endah. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Soelarso. 1998. *Modal Mata Pelajaran Adminitrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan*. UGM. Yogyakarta.

Subroto K, Usman B. *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta. Yayasan Bina Pajak.

Syuhada Sofian. 1997. *Prospek dan Alternatif "Action Plan" Pemajakan Reklame Dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang*. Gema Stikubang. Semarang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang pemerintahan Daerah* (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Waluyo dan Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Wibisono, Dermawan. 2005. *Metode Penelitian & Analisis Data*. Salemba Medika. Jakarta.

Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM.

Sondang,P Siagian. 1994. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Adminitrasi*. Jakarta: Gunung Agung.